

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

.....  
W O N O S O B O  
.....

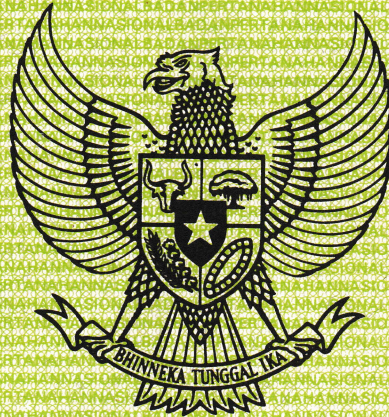
*Pertanian*

*SEPO DWS/MP/01/2*

AL 464233

1	1	·	2	5	·	0	6	·	2	0	·	4	·	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK : **PAKAI** No. **3**



PROPINSI : **JAWA TENGAH**

KABUPATEN/KOTAMADYA : **WONGSOREJO**

KECAMATAN : **SELAMERTO**

DESA/KELURAHAN : **ADEJENG**

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208  
No. **166/B/BPN** /19 **2001**

DAFTAR ISIAN 307  
No. .... /19....

**WONGSOREJO**

11.25.06.20.4.00003

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b>                  No. : <b>3</b>                  Desa : <b>ADIWARNO</b></p>	<p>d) <b>NAMA PEMEGANG HAK</b>                  = <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</b> =                  Berkedudukan di Jakarta.</p>
<p>b) <b>NAMA JALAN/PERSIL</b>                  Ds. <b>Adiwarno</b></p>	<p>e) <b>PEMBUKUAN</b>                  W. e. n. e. s. e. b. e. .... Tgl. <b>20 - 9 - 2000</b>                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten/Kotamadya                  ..... <b>Wanayasa</b> .....</p>
<p>c) <b>ASAL PERSIL</b>                  1. Konversi                  2. Pemberian hak <b>Pakai asal Tanah Negara Bekas C No. 378 Ps. 62/S. II Luas 7000 M2.</b>                  3. Pemisahan                  4. Penggabungan</p>	<p>TTD.                  ..... <b>Ir. TJIPTADI, SH</b> .....</p> <p align="center">NIP <b>010 166 138.</b></p>
<p>d) <b>SURAT KEPUTUSAN</b>                  KEPALA KANTOR WILAYAH                  BADAN PERTANAHAN NASIONAL                  PROPINSI JAWA TENGAH                  TGL: <b>23 - Juni - 2000</b>                  No. SK. 530.3/1348/3/070/33/                  2000.</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi                  Rp. 0,-</p> <p>Lamanya hak berlaku                  Selama dipergunakan</p> <p>Berakhirnya hak                  Tgl.</p>	<p>h) <b>PENERBITAN SERTIPIKAT</b>                  W. e. n. e. s. e. b. e. .... Tgl. <b>20 - 9 - 2000</b>                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten/Kotamadya                  ..... <b>Wanayasa</b> .....</p> <p>TTD.                  ..... <b>Ir. TJIPTADI, SH</b> .....</p> <p align="center">NIP <b>010 166 138.</b></p>
<p>e) <b>SURAT UKUR GAMBAR SITUASI</b>                  Tgl <b>27 - 11 - 1997</b>                  No. <b>2318/BPN/1997</b>                  Luas <b>± 7.000.</b></p>	<p>i) <b>PENUNJUK</b></p>





11.25.06.20.4.00003

Nomor hak : .....

# SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : ..2318/SPN... /19.97

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : .....**JAWA TENGAH.**

Kabupaten/Kotamadya : .....**KONOSORO.**

Kecamatan : .....**SELONORO.**

Desa/Kelurahan : .....**ADIWARNO.**

Peta : .....

Lembar : ..... Kotak : ..... Nomor Pendaftaran : .....

Keadaan Tanah : .....**Sebidang tanah pertanian.**

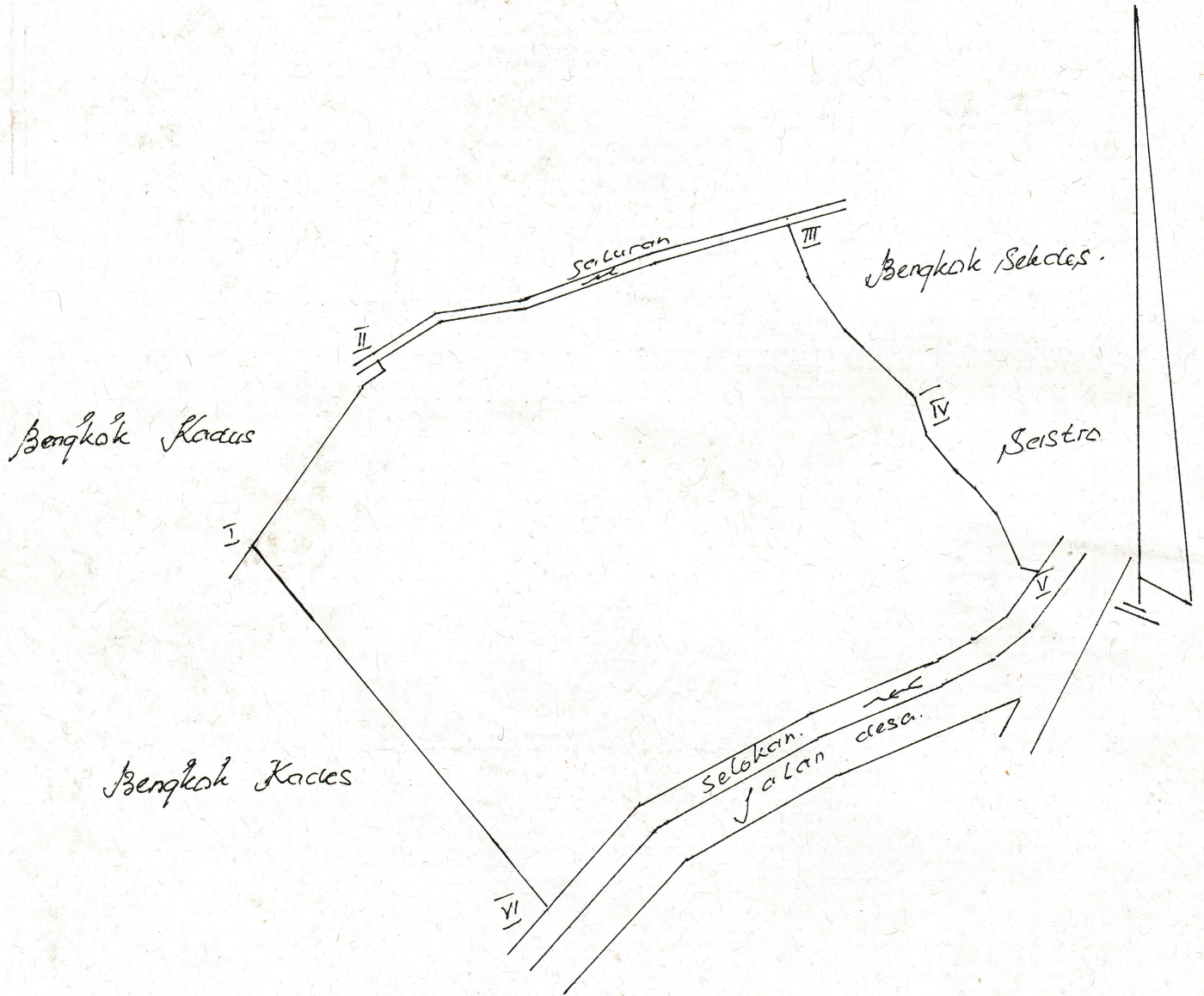


Tanda-tanda batas : .....**Tatok, patok kayu, I s/d VI. Benjari diatas batas.**

Luas : .....**+ 7000 M2 ( Tujuh ribu meter persegi )**

Penunjukan dan penetapan batas : .....**Suparno**

PERBANDINGAN 1 : ..... 1000 .....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini



# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—